

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**



**TESIS**

Oleh:

**ELLEIN**

**01022681923028**

**Magister Ilmu Ekonomi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Magister*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
ILMU EKONOMI  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim

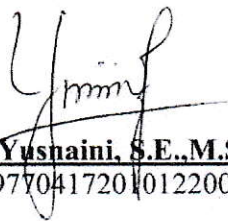
Nama : Ellein..

Nim : 01022681923028

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

BKU : Akuntansi

Pembimbing Pertama



Dr. E. Yuspaini, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 197704172010122001

Pembimbing Kedua



Dr. Shelly E. Kartasari, S.E., M.Si., Ak., CSRA  
NIP. 198102192002122001

Ketua Program Studi



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015



**Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Sriwijaya**  
Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.F  
NIP. 196706241994021002

**Tanggal Lulus 06 Maret 2023**  
**(tanggal lulus ujian tesis)**

KEMENTERIAN RISET & PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662

Telepon. (0711) 580964, Faksimile (0711) 580-964

Laman : <http://fe.unsri.ac.id> email: [dekan@fe.unsri.ac.id](mailto:dekan@fe.unsri.ac.id)



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**Ketua** Dr. E. Yusnaini, S.E.,M.Si.,Ak.,CA  
NIP. 197704172010122001

**Sekretaris** Dr. Shelly F. Kartasari, S.E.,M.Si.,Ak.,CSRA  
NIP. 198102192002122001

**Anggota** (1) Dr. Relasari, S.E.,M.Si.,Ak.,CA  
NIP. 197206062000032001

(2) Dr. Ika Sasti ferina, S.E.,M.Si.,Ak  
NIP. 197802102001122001

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



BUKTI TELAH MEMPERBAIKI TESIS  
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. E. Yusnaini, S.E.,M.Si.,Ak.,CA		Maret 2023
2.	Dr. Shelly F. Kartasari, S.E.,M.Si.,Ak.,CSRA		Maret 2023
3.	Dr. Relasari, S.E.,M.Si.,Ak.,CA		Maret 2023
4.	Dr. Ika Sasti ferina, S.E.,M.Si.,Ak		Maret 2023

Menerangkan bahwa:

Nama : Ellein  
Nim : 01022681923028  
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi  
BKU : Akuntansi  
Judul Tesis : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim

**Telah memperbaiki tesis hasil ujian**

Palembang, Maret 2023  
Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Dr. Anna Yulianita, S.E.,M.Si**  
NIP. 197007162008012015

## HALAMAN PERNYATAN

Nama : Ellein  
NIM : 01022681923028  
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi  
BKU : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Seluruh data, informasi, serta pernyataan dalam pembahasan & kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli & belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya & apabila dikemudian hari ditentukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah

Palembang, Maret 2023

Yang memuat pernyataan



Ellein

01022681923028

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ellein  
NIM : 01022681923028  
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi  
BKU : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim” bebas dari plagiarisme & bukan hasil karya orang lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah saya terdapat indikasi plagiarism, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palembang, Maret 2023  
Yang memuat pernyataan



Ellein

01022681923028

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah & Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim” Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Magister Sains Program Strata Dua (S2) BKU Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian & penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan & mungkin masih jauh dari kata sempurna. Atas segala keterbatasan dalam penyusunan tesis ini, penulis menyampaikan maaf yang sebesar besarnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Palembang,      Maret 2023  
Yang memuat pernyataan



Ellein

01022681923028

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak, sehingga dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. E. Yusnaini, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing pertama & Ibu Dr. Shelly F. Kartasari, S.E.,M.Si.,Ak.,CSRA selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran & memberikan ilmunya serta membimbing & mengarahkan selama penyusunan tesis ini.
2. Ibu Dr. Relasari, S.E.,M.Si.,Ak dan Ibu Dr. Ika Sasti Ferina, S.E.,M.Si.,Ak selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan masukan dan sarannya dalam peningkatan kualitas tesis ini.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., sebagai Rektor Universitas Sriwijaya. Serta saya ucapkan terimakasih untuk Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E.,M.E sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya & Ibu Dr. Anna Yulianita, S.E.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Staf & Petugas Fakultas Ekonomi yang turut membantu kelancaran dalam proses pembuatan tesis ini.
5. Bapak Edia Tapsil, S.H dan Ibu Juniati, S.Pd.,M.Si, kedua orangtua yang terhebat yang senantiasa mendukung, memotivasi serta memberikan nasihat dan arahan untuk pendidikan saya.
6. M. Rizki Prasetya, S.Psi, Lydia febriati, S.E.,Ak dan Rasuan Saleh, yang senantiasa memberi motivasi, dukungan serta memberikan nasihat dan arahan kepada saya untuk menjadi lebih baik.

Palembang, Maret 2023

Yang memuat pernyataan





**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  
Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas  
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Muara Enim diolah menggunakan *evIEWS 10*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 19 dinas dan sampel penelitian ini terdiri dari 55 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

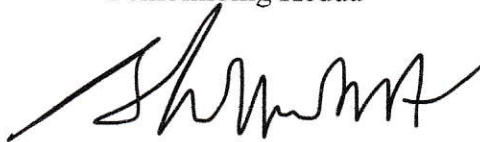
**Kata Kunci** : Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pembimbing Pertama



**Dr. E. Yusraini, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 197704172010122001

Pembimbing Kedua



**Dr. Shelly F. Kartasari, S.E., M.Si., Ak., CSRA**  
NIP. 198102192002122001

Ketua Program Studi



**Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si**  
NIP. 197007162008012015

**The Effect Of Internal Control System, Utilization Of Information  
Technology, Application Of Regional Financial Accounting Systems On The  
Financial Accountability Of The Regional Government  
Of Muara Enim Regency**

**ABSTRACT**

This research aimed to examining the system internal control, utilization technology information, application system accountancy finance area to accountability finance area. This type of quantitative research was conducted in Muara Enim Regency. This research also uses primary data obtained from the results of questionnaires on regional apparatus organizations in Muara Enim Regency processed using *views10*. The analytical method used is multiple linear analysis. The population in this research were 19 department and the research sample consisted of 55 respondents. The research provides the results that internal control system has a negative and significant effect on regional financial accountability, meanwhile utilization technology information and system accountancy finance area influential positive and significant to accountability finance area.

**Keywords :** Internal Control System, Utilization Technology Information, Regional Financial Accounting System, Regional Financial Accountability

Pembimbing Pertama



**Dr. E. Yasnaini, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 197704172010122001

Pembimbing Kedua



**Dr. Shelly F. Kartasari, S.E., M.Si., Ak., CSRA**  
NIP. 198102192002122001

Ketua Program Studi



**Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si**  
NIP. 197007162008012015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UACAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i> .....	12
2.1.2 Sistem Pengendalian Intern .....	13
2.1.2.1 Indikator Sistem Pengendalian Intern .....	14
2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	14
2.1.3.1 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	17

2.14 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	17
2.1.4.1 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	18
2.1.5 Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	19
2.1.5.1 Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	20
2.1.6 Penelitian Sebelumnya .....	21
2.1.7 Kerangka Pemikiran .....	23
2.1.8 Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	29
3.2 Rancangan Penelitian .....	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Populasi dan Sampel .....	31
3.5 Definisi Operasional Pengukuran Variabel.....	32
3.6 Teknik Analisis .....	36
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	36
3.6.2 Regresi Linier Berganda.....	36
3.6.3 Uji Normalitas .....	37
3.6.4 Uji Realiabilitas Data .....	38
3.6.5 Pengujian Hipotesis .....	38
3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t) .....	38
3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F).....	38
3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Tinjauan Penelitian.....	40
4.1.2 Uji Instrumen Penelitian.....	41
4.1.2.1 Uji Validitas .....	41

4.1.2.2 Uji Reliabilitas .....	43
4.1.3 Karakteristik Responden Penelitian .....	44
4.1.3.1 Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
4.1.3.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Usia .....	45
4.1.3.3 Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Jabatan.....	46
4.1.3.4 Identifikasi Responden Berdasarkan Instansi .....	47
4.1.4 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4.1.5 Hasil Regresi Linier Berganda .....	51
4.1.6 Uji Asumsi Klasik .....	53
4.1.6.1 Uji Normalitas.....	53
4.1.6.2 Uji Autokorelasi.....	55
4.1.6.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.1.6.4 Uji Multikolinearitas .....	56
4.1.7 Pengujian Hipotesis .....	58
4.1.7.1 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	58
4.1.7.2 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	60
4.1.7.3 Koefisien Determinasi .....	60
4.1.8 Pembahasan.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	71
5.3 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK Terhadap LKPD di Lingkungan Muara Enim .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya .....	21
Tabel 3.1 Kriteria Sampel .....	31
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Variabel X1 .....	41
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Validitas Variabel X2 .....	42
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Variabel X3 .....	42
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Variabel Y .....	43
Tabel 4.5 Uji Realiabilitas.....	44
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin .....	45
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Menurut Usia .....	46
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Menurut Jenis Jabatan .....	47
Tabel 4.9 Karakteristik Responden Menurut Instansi.....	48
Tabel 4.10 Analisis Statistik Deskriptif .....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Linier Berganda .....	52
Tabel 4.12 Hasil Autokorelasi dengan Menggunakan Uji LM .....	55
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Menggunakan Uji White	56
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas dengan Matrik Korelasi.....	57
Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	58
Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir .....	26
Gambar 3.1 Model Penelitian .....	30
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan <i>Jarque-Bera</i> .....	54

## **LAMPIRAN**

Data Populasi dan Sampel.....	78
Kuesioner Penelitian .....	79
Data Primer Penelitian .....	81
Interpretasi Hasil Analisis .....	84



# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap bangsa di zaman perubahan membutuhkan apa yang sering disebut dengan *good governance* . Melalui otonomi daerah, kebijakan nasional dalam berbagai ranah, seperti pengelolaan keuangan daerah, diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan pelaksanaan otonomi daerah termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kecuali daerah yang tidak berwenang.

Mengingat keuangan pemerintah daerah akan menciptakan pemerintahan yang transparan dan lebih akuntabel.

Aturan pemerintah akan memastikan bahwa ketentuan yang memadai dibuat untuk dana bagi hasil. Saat memutuskan seberapa besar kekuasaan yang akan disediakan untuk setiap daerah, anggaran nasional dan daerah harus dipertimbangkan. Reformasi telah dilaksanakan di Indonesia untuk menuju era yang lebih transparan dan akuntabel. Pelaksanaan APBN dan APBD secara historis hanya akan menghasilkan laporan keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan telah menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang disampaikan kepada legislatif wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003. Pemeriksaan BPK yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemberian pendapat (Opinion) , sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Laporan keuangan perlu memiliki kriteria yang dapat diterima, seperti relevansi nilai, ketergantungan, keterbandingan, dan pemahaman, agar dianggap berkualitas tinggi ( Harmawati , 2016). Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana publik, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi keempat persyaratan tersebut. BPK menjatuhkan empat putusan berbeda: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Adil (TP), dan Surat Pernyataan Menolak Putusan atau Tidak Putusan (TMP).

Berdasarkan temuan audit BPK terhadap LKP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim , laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan tren positif yang meningkat dari tahun 2010 hingga 2021. Semakin tingginya kualitas data yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah tercermin dari pergeseran pemikiran tersebut. . Artinya, masyarakat kini lebih percaya pada keterbukaan data sebagai dasar akuntabilitas keuangan daerah. Artinya, ketersediaan informasi publik yang akurat dan terpercaya dapat mempengaruhi akuntabilitas. Tabel di bawah ini menampilkan revisi penilaian BPK terhadap LKPD:

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD di Lingkup Muara Enim**

TIDAK	TAHUN	HASIL PEMERIKSAAN KABUPATEN MUARA ENIM	
		Opini Pak	Tspi
1	2010	WDP	9
2	2011	WDP	10
3	2012	WDP	7
4	2013	WTP-DPP	7
5	2014	WTP	11
6	2015	WTP	3
7	2016	WTP	5
8	2017	WTP	5
9	2018	WTP	5
10	2019	WTP	3
11	2020	WTP	6
12	2021	WTP	3

*Sumber: Laporan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2010-2021*

Berdasarkan Tabel 1.1, hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Muara Enim menunjukkan hasil Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan pemerintah daerah mampu menaikkan opini dari Pengecualian Wajar ( WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. (WTP) pada tahun 2013, meskipun masih memiliki paragraf penjelas. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. (WTP). Jika membandingkan tahun-tahun penerimaan opini audit WTP dan opini audit WDP, terlihat bahwa opini audit WTP lebih sering diperoleh. Munculnya masalah ini menunjukkan bahwa standar pemeriksaan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Jika hasilnya sedang-sedang saja, Pemkab Muara Enim mungkin bisa mendapatkan

opini WTP. Mungkin ada unsur-unsur selain temuan audit yang mempengaruhi opini audit, sehingga wajar jika temuannya sedikit atau sedikit tetapi tetap tidak ada opini WTP.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) daerah layak untuk ditelaah lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Muara Enim , misalnya, telah mendapatkan beberapa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pemerintah juga tidak luput dari korupsi dan kecurangan. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Kepala BPK RI, penilaian Anda terhadap laporan keuangan tidak dapat memastikan bahwa korupsi tidak ada di pemerintah daerah ( Pajrin , 2019). Misalnya, pemerintah Muara Enim telah memberikan opini WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut. Namun, ada bukti-bukti kecurangan yang merugikan negara, sehingga tetap diperiksa dan ditangani.

Laporan keuangan World Trust Project (WTP) seharusnya menunjukkan bahwa pemerintah telah efisien dan transparan. Namun, hal itu tampaknya menjadi ajang pamer prestasi pejabat pemerintah pusat dan daerah. Opini Audit WTP berguna untuk mengevaluasi laporan keuangan pemerintah meskipun tidak diamanatkan oleh undang-undang. Kejadian-kejadian ini memotivasi penulis untuk menyelidiki lebih lanjut. Jika laporan keuangan pemerintah diberi opini WTP (WTP), masyarakat lebih cenderung menerima data yang disajikannya. Meskipun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai lembaga pengelola aset daerah dapat diuji, kepercayaan tersebut akan diuji jika opini audit tetap dalam bentuk WDP (memenuhi syarat dengan pengecualian) atau pandangan audit yang tidak

wajar lainnya selama tahun anggaran berjalan. Fenomena pemerintah daerah yang terdorong untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK, karena penilaian tersebut cenderung melambangkan legitimasi suatu yurisdiksi di mata konstituennya.

Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi bagian dari reformasi administrasi keuangan publik di Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan bahwa semua lembaga pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab kepada DPR/DPRD atas semua dana yang digunakan untuk melaksanakan APBN/APBD. Sebagai sarana pemberian informasi yang tidak mencakup kegiatan kinerja pemerintah kepada pihak yang berkepentingan, laporan keuangan yang disusun dalam rangka pemerintahan menuju pertanggungjawaban keuangan dapat dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD di masa lalu. . Pemerintah daerah harus meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelaksanaan tanggung jawab keuangan. Daerah mewajibkan pemerintah daerahnya untuk melaporkan kinerja pemerintah daerah secara horizontal kepada DPRD sebagai bentuk *akuntabilitas horizontal* , selain secara vertikal kepada pemerintah atasannya.

Istilah "pertanggungjawaban keuangan" mengacu pada kebutuhan untuk bertindak secara sah dan etis sehubungan dengan urusan keuangan seseorang. Uang yang diterima, disimpan, dan didistribusikan oleh lembaga pemerintah menjadi subjek pertanggungjawaban ini, yang didasarkan pada laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang relevan (LAN dan BPKP, 2000). Publik perlu

mengetahui apakah pemerintah telah berfungsi secara ekonomi, efisien, dan berhasil melalui pembacaan laporan hasil inisiatif pemerintah. Bukti akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dan apakah mereka sejalan atau tidak dengan norma yang berlaku.

Selain diwajibkan oleh undang-undang, laporan keuangan juga harus bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (Harmawati, 2016). Akuntabilitas wali amanat adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan tindakan agen serta karyawannya kepada penerima manfaat dari kepercayaan yang memiliki hak untuk meminta informasi tersebut (Harmawati, 2016).

Kebutuhan untuk menyediakan laporan keuangan pemerintah yang dapat dipercaya paling baik diilustrasikan oleh *Stewardship Theory*. Masyarakat berperan sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai steward, dalam filosofi *stewardship* administrasi pemerintahan. Kepala sekolah menemukan lebih banyak tantangan untuk melaksanakan tugas mereka sendiri sebagai akibat dari tuntutan akuntabilitas yang meningkat dari administrasi sektor publik. Oleh karena itu, penting untuk membagi kepemilikan dari manajemen. Sebagai akibat langsung dari kendala pemimpin daerah sendiri, kewajiban pengelolaan sumber daya akan didistribusikan.

Menurut *Stewardship Theory*, persetujuan publik atas akuntabilitas fiskal pemerintah berdampak signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah tersebut (Ahmad, 2019). Menurut pandangan ini, administrasi kotamadya harus

memprioritaskan pembentukan mekanisme yang kuat untuk menghitung dana publik. Sistem pengendalian internal adalah prosedur yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan pekerja yang dimaksudkan untuk menawarkan jaminan yang wajar bahwa bisnis akan mencapai tujuannya dan mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang relevan (Indria Nurani, 2018) . Sebagai sarana untuk mengarahkan tindakan warga dan tenaga kerjanya, pemerintah juga harus menggunakan instrumen kontrol.

Jaminan yang cukup bahwa tujuan akan terpenuhi telah disediakan oleh sistem pengendalian internal. Investigasi Andika Elis Saputra (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tanggung jawab keuangan. Sistem pengendalian internal secara positif mempengaruhi tanggung jawab keuangan, seperti yang ditunjukkan oleh studi oleh Babatude dan Shakirat Adepju (2013) dan Eka Suprihastini (2017). Salah satu tujuan utama dari reformasi pemerintahan adalah untuk meningkatkan *tata kelola* , dan penggunaan TI dalam administrasi pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan merupakan komponen kunci dari perbaikan ini ( Ratna Indah, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riadul Jannah *dkk* . (2018), menerapkan solusi TI secara signifikan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas manajemen keuangan.

Banyak penelitian terdahulu yang mendefinisikan akuntansi keuangan daerah sebagai suatu sistem pencatatan, pengkategorian, analisis, dan pengikhtisaran transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya

dalam rangka pelaksanaan APBD, semuanya menurut standar akuntansi yang berlaku umum. Sistem akuntansi keuangan daerah dikaji oleh Eka Suprihastini (2017) sebagai variabel independen yang menuntut akuntabilitas keuangan untuk meningkatkan kualitas keuangan pemerintah dan pengelolaan keuangan. Sedangkan As Syifa Nurillah (2014) menemukan bahwa akuntansi keuangan daerah meningkatkan transparansi dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah.

*Tata kelola* yang baik di sektor publik merupakan hasil dari tanggung jawab keuangan daerah yang kuat. Pengawasan keuangan dan anggaran di tingkat kota sangat penting mengingat perkembangan terakhir di sektor publik. Tingkat signifikansi yang berbeda ditemukan pada penelitian sebelumnya untuk berbagai variabel karakteristik akuntabilitas keuangan, dan studi akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan di Indonesia relatif sedikit. Yang menarik untuk penelitian tambahan tentang unsur-unsur yang berdampak pada tanggung jawab keuangan pemerintah daerah adalah jumlah penelitian yang sedikit dan ketidaksesuaian dalam kesimpulan penelitian tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, komponen lain yang dapat mempengaruhi tanggung jawab keuangan, adalah penting. Studi sebelumnya hanya menunjukkan jika tanggung jawab fiskal mempengaruhi pemerintah kota.

Sehubungan dengan pengakuan Kabupaten Muara Enim sebagai Pemerintah Daerah “Adil Dengan Pengecualian” untuk periode 2010–2012, peneliti melakukan studi di sana (WDP). Kedua, penemuan besar/tinggi, namun



pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim diberikan status WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim tidak akuntabel secara memadai dalam hal integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari sistem pengendalian intern yang kurang efektif, penggunaan teknologi informasi yang kurang optimal. , dan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak dapat diandalkan.

Penulis tertarik dengan fenomena ini karena ingin mempelajari lebih jauh keterkaitan antara internal control, IT, dan transparansi dan akuntabilitas keuangan Kabupaten Muara Enim . Penelitian mereka yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Penggunaan IT, dan Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota di Kabupaten Muara Enim , bertujuan untuk melakukan hal tersebut. Administrasi kota Kabupaten Muara Enim dianalisis sebagai bagian dari penelitian ini.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Masalah berikut muncul dari penelitian ini berdasarkan fenomena yang digunakan dalam latar belakang penyelidikan:

1. Bagaimana sistem pengendalian intern mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah?

3. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini berdasarkan uraian masalah di atas:

1. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Menganalisis penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
3. Menganalisis penerapan pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Keuntungan teoretis dan praktis dari penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sistem pengendalian internal, IT, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah semuanya dapat berdampak signifikan terhadap transparansi moneter, sehingga mengutip studi yang relevan adalah ide yang bagus. Penulis mengungkapkan optimisme bahwa lebih banyak studi akan memberikan hasil yang bermanfaat.
2. Secara praktis, akuntabilitas keuangan dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern, IT, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah,

yang kesemuanya dapat menjadi acuan dokumen ini bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim . Bangunan dan infrastruktur lainnya dapat membantu membuka jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Menyumbang ide untuk meningkatkan tanggung jawab keuangan daerah kepada entitas pemerintah di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adepeju , S.2016 . *Persepsi Stakeholder Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Sektor Publik Nigeria Persepsi Stakeholder Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Sektor Publik Nigeria Se.* Jurnal Internasional Penemuan Bisnis dan Manajemen ISSN , 2 (1), 16–33.
- Agustin, N. 2019. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau .* Akuntansi Dan Manajemen , 14 (2), 109–118
- Ahmad, Z. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya..., Zulfikar Ahmad, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2019 .* 10–24.
- Animasaun , RO, dan Adegbite, IA 2016. *Independensi dan Akuntabilitas Auditor Lembaga Tinggi Federal di Negara Bagian Ogun .* 7 (24), 188–203.
- Andriyani , I. (2017). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten .* *Jurnal Akuntansi* , 5 (2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Aramide , SF, Mustapha, and Bashir, M. 2015. *Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Tingkat Pemerintah Daerah Di Nigeria.* *Jurnal Penelitian Internasional Dalam Manajemen Bisnis* , 3 (8), 2321–2886.
- Aristanti , W. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Sekolah Dasar Di Bandung Indonesia.* *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi Www .* Lihat , 6 (24), 2222–1697.
- SEBAGAI Syifa Nurillah . 2014. *Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi, (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).* Tesis .
- Asoka, R. 2016. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Musi Banyuasin Kabupaten .* *Jurnal STIER* , 4 (1), 12–20.
- Atieno , OM 2020. *Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Publik Nasional .* 76–100.

- Badruzaman , J. (2012). Badruszaman Pengaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap *Pelaksanaan Good pemerintahan* . *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* , 7 (1), 57–70.
- Cruz, AP 2013 . *Pengolahan Data Penelitian Kuantitatif Menggunakan Eviews* . *Jurnal Informasi dan Pemodelan Kimia* , 53 (9), 1689–1699.
- Dewi , NF, Ferdous Azam, SM, & Yusoff , SKM 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Keuangan*. *Surat Ilmu Manajemen* , 9 (9), 1373–1384.
- Dewata , E., Jauhari , H., Aprianti , S., & Hijria , EN 2018. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Dinamika Bisnis* , 5 (2), 151–162.
- Djalil , M., Nadir, N., dan Fatmi , L. 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( A Research On Go* , *Jurnal Penelitian Keuangan dan Akuntansi* , 8 (April), 106–114.
- Eton, M., Murezi , C., Mwosi , F., dan Ogwel , PB 2018. *Sistem kontrol internal dan akuntabilitas keuangan di Uganda: Kasus distrik terpilih di barat* . (2003), 106–111.
- Fhadillah , SN, dan Yudianto , I. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Aset dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Bandung* . *Jurnal Audit Akuntansi dan Bisnis* , 1 (1), 62.
- Husnawati , N., Handajani , L., dan 2017. *Kecurangan Akuntansi: Penentu, Moderasi Sistem Pengendalian Intern Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan* . *E-Proceeding Stie ...* , (60), 311–335.
- Hidayah , N. 2018. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi* .
- Rangkuman Hasil Pemeriksaan Tahun 2018 . 2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.

- Ghozali , I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25* . Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro .
- Imam Ghozali . 2022. *Statistik* . Diambil dari Statistik Imam Ghozali PDF - harasi.gbznd.us
- Di dalam, S. (2023). *Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi* . 3 (1), 46–66.
- Jefri , R. (2018). Teori *Penatalayanan dan bagus pemerintahan* . *Jurnal Penelitian Edisi XXVI* , 4 (3), 14–28.
- Jurnal, I. 2012. *Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Akuntabilitas Keuangan di bawah Dispensasi Demokrasi di Nigeria* . 1 (10), 14–20.
- Kartolo , P.andi . (2019). *Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Opini WDP dan WTP Tahun 2009-2017* . Diambil dari <https://repository.unsri.ac.id/21181/>
- Karyadi , M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penggunaan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Rinjani* , 7 (2), 33–46. Diambil dari <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/123>
- Kewo , CL 2017. *Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern Dan Kinerja Manajerial Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia* . 7 (1), 293–297.
- Manaroinsong , J. 2014. *Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Keuangan Dalam Rangka Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara-*. *Jurnal Penelitian Keuangan dan Akuntansi* , 5 (20), 21–38.
- Marlina , L. (2018). Bab Ii Landasan Teori. *Jurnal Informasi Kimia dan Pemodelan* , ( Risdiansyah 2017), 7–19. Diambil dari [https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/215072/File-10\\_Bab-II-Landasan-Teori.pdf](https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/215072/File-10_Bab-II-Landasan-Teori.pdf)
- Mene , RE, Karamoy , H., & Warongan , JD. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Kelangsungan *Hidup : Jurnal Riset Akuntansi* , 13 (04), 133–143. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018>

- Michael, MN, dan Eric, M. 2020 . *Pengendalian Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Nyanza Selatan di Kenya*. *Jurnal Penelitian Keuangan dan Akuntansi* , 11 (6), 32–38.
- Muhammad Fadil . (2020). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)* .
- Nasir, A., & Oktari , R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi* , 19 (02), 1–14.
- Novianti , L. (2015). *Tata Kelola Sektor Publik di Pemerintah Daerah. Tata Kelola Sektor Publik* , 112. Diambil dari [http://repository.uin-suska.ac.id/16746/1/Ringkasan buku Pemerintah sektor publik LENYnoFIANTI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/16746/1/Ringkasan_buku_Pemerintah_sektor_publik_LENYnoFIANTI.pdf)
- Nurhakim , MRS 2014. *Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern*. *Jurnal Administrasi Media, Pengembangan dan Praktek Administrasi* , 9 (3), 403–422.
- Pramudiarta , R. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual* . 1–281.
- Publikasi, H. 2020. *Dampak Sistem Pengendalian Internal yang Efektif terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Perguruan Tinggi di Bauchi State-Nigeria*. Hamidu Shehu . 20 (7), 148–157.
- Qomariyah , L., & Sulistyowati , E. (2022). Analisis Penerapan *Tata Kelola Yang Baik Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Pada Yayasan YPI Darussalam Cerme)* . *Jurnal Akuntansi Kompetitif* , 5 (1). Diambil dari <https://www.ejournal.kompetif.com/index.php/akunansikompetif/article/view/834/576>
- Rafindadi , AA, dan Olanrewaju, ZA 2019. *Dampak Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Nigeria: Bukti Dari Model Persamaan Struktural*. *Tinjauan Internasional Manajemen dan Pemasaran* , 9 (3), 49–63.
- Ramadhan, syahrul , dan zuve , farel olva . 2020. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia* . <https://doi.org/10.31227/osf.io/j62me>

- Ramon, D. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Inspektorat Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi , Vol. 2, hlm. 1–19.
- Sakinah, Annisa Nur. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. *Ay an* , 8 (5), 55.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dalam *E-Jurnal Akuntansi* .
- Santoso, EB 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah* . Skripsi, Program Pascasarjana Akuntansi, Lampung.
- Saputra , EA (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Inspektorat Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi* , Vol. 2, hlm. 1–19.
- Sugiyono . (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D* . Bandung: Alfabet.
- Suprihastini , E., Akram , MM, dan Santoso, B. 2017 . *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Pemeriksaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah* . Konferensi Internasional dan Call for Papers, Jember , 830–852.
- Winidyaningrum . 2009. *Pengaruh Penggunaan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Intervening Pengendalian Akuntansi Internal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Subosukawonosraten )* . Tesis
- Widyaningsih , A. 2016. *Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Sekolah Dasar Di Kota Bandung Indonesia* . Jurnal Penelitian Keuangan dan Akuntansi , 7 (10), 10–16.
- W, RSAA, & Probohudono , AN (2015). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidaktepatan dan Kerugian Negara. *Jurnal INTEGRITAS Anti Korupsi* , 1 (1), 81–110.



- Yendrawati , R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Audit Indonesia* , 17 (2), 165–174. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art7>
- Yulianti , W., Kamaliah , & Apostlei . (2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris Di Pangkalan Kecamatan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi* , 27 (4), 386–398.
- Yustika . (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat Desa. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi* .
- Zeyn , E. 2018. *Pengaruh Kualitas Audit Internal Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Daerah*. Riset Bisnis dan Keuangan , 4 (2), 74–82.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Bandung: Focusmedia .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . (2006). Bandung: Focusmedia .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan